

**PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH
(STUDI DI DESA BUKIT PADI KECAMATAN JEMAJA
TIMUR, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS)**

Oleh:

**EROMZI
NIM. 1700574201028**

ABSTRAK

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya di tulis di dalamnya serta menjelaskan lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan dan penataan masalah pertanahan adalah melalui Transmigrasi. Salah satu daerah yang termasuk dalam kawasan Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi yakni Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur yang kini berada dalam kawasan transmigrasi dan berstatus Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 83/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perumahan Hutan Atas Tanah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun, terdapat sebuah problematika dimana pembuatan sertifikat lahan masyarakat menjadi terhambat. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya di masyarakat. Berdasarkan teori kepastian hukum, tidak ditemukan adanya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah berupa alashak di Desa Bukit Padi. Hal ini diketahui dari penelitian yang dilakukan bahwa tidak adanya pemberian sertifikat kepada masyarakat yang tanahnya masuk kedalam kawasan hak pengelolaan departemen transmigrasi. Surat alas hak merupakan bukti penguasaan tanah, bukan merupakan bukti kepemilikan. Tidak adanya suatu perlindungan dalam hak keperdataan serta tentunya menyebabkan kerugian dalam hak keperdataan. Penulis menemukan masyarakat di Desa Bukit Padi belum terlindungi dalam hak keperdataan. Serta tidak ditemukan upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak keperdataan tanah masyarakat yang masuk kedalam kawasan pengelolaan departemen transmigrasi.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Transmigrasi, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum

**PROBLEMATICS OF ISSUING LAND OWNERSHIP CERTIFICATES
(CASE STUDY IN BUKIT PADI VILLAGE, JEMAJA DISTRICT
EAST, ANAMBAS ISLANDS DISTRICT)**

By:

**EROMZI
NIM. 1700574201028**

ABSTRACT

A certificate is a proof of land rights, an acknowledgment and confirmation from the state of individual or joint ownership of land or a legal entity whose name is written in it and explains the location, image, size and boundaries of the land plot. One of the efforts made by the government in managing and structuring land issues is through transmigration. One of the areas included in the Management Rights area of the Transmigration Department is Bukit Padi Village, East Jemaja District, which is now in the transmigration area and has the status of Management Rights of the Transmigration Department which refers to the Decree of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number: 83/HPL/BPN /97 concerning the Granting of Management Rights on Behalf of the Department of Transmigration and Settlement for Forest Housing on Land in the Anambas Islands Regency. However, there is a problem where the creation of community land certificates is hampered. The approach taken is a normative approach, namely by examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Based on the theory of legal certainty, there is no legal certainty regarding land ownership in the form of pedestals in Bukit Padi Village. It is known from the research conducted that there is no certificate given to people whose land falls within the management rights area of the transmigration department. The title deed is proof of land control, not proof of ownership. The absence of protection in civil rights also of course causes losses in civil rights. The author found that the people in Bukit Padi Village have not been protected by civil rights. And there were no efforts by the regional government to protect the civil rights of community land which falls within the management area of the transmigration department.

Keywords: Land Registration, Transmigration, Legal Certainty, Legal Protection